

PENERBITAN SURAT KETERANGAN LUNAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA HAK TAGIH NEGARA

Rendy Erianto Jullyan*, Dr. Suhartati, S.H., M.Hum., Wafia Silvi Dhesinta Rini, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293
Email: rendyerianto64@gmail.com

Abstrak

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa namun berbanding terbalik dengan pemberantasannya. Proses peradilan kasus korupsi sering kali menguntungkan terhadap pelaku. Kasus korupsi yang terjadi adalah yang dilakukan oleh SAT dengan menyalahgunakan wewenang memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor namun malah didakwa dengan Pasal 2 UU Tipikor yang memperlemah pembuktian terhadap perbuatan SAT dan menyebabkan SAT diputus lepas dari segala tuntutan hukum dalam kasasi MA. Sehingga tulisan ini bertujuan untuk menganalisis apakah perbuatan SAT yang menerbitkan SKL terhadap SN sehingga menyebabkan kerugian negara dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Pasal 3 UU Tipikor. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan sistematika hukum yang berkaitan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan SAT menutupi fakta bahwa SN melakukan kesalahan dalam menampilkan hutang petani petambak plasma sebagai kredit lancar padahal adalah kredit macet, serta SAT melakukan penghapusbukuan terhadap piutang BDNI milik SN padahal diketahui oleh SAT bahwa terdapat transaksi tidak wajar yang dilakukan BDNI dengan menggunakan dana bantuan BLBI dipasar uang antar bank. Dengan demikian terhadap perbuatan SAT dapat dikenakan pemidanaan berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor dan dapat dilakukan upaya hukum karena belum melampaui daluarsa penuntutan pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara.

Abstract

Corruption is classified as an extra ordinary crime but is inversely proportional to its eradication. The judicial process of corruption cases is often favorable to the perpetrators. The corruption case that occurred was carried out by the SAT by abusing its authority to fulfill the elements of Article 3 of the Anti-Corruption Law but was instead charged with Article 2 of the Anti-Corruption Law which weakened the evidence against the SAT's actions and caused the SAT to be dismissed from all lawsuits in the Supreme Court's appeal. So this paper aims to analyze whether the SAT's actions in issuing SKL against SN that caused state losses can be subject to criminal liability in terms of Article 3 of the Corruption Law. The method used is normative juridical law research on statutory regulations, legal principles and related legal systematics to answer problems. The results showed that the SAT covered up the fact that SN made an error in displaying the debts of plasma farmers as current loans even though they were bad loans, and the SAT wrote off BDNI receivables belonging to SN even though there were unfair transactions carried out by BDNI using BLBI aid funds in the interbank money market. Thus, the SAT's actions can be subject to punishment based on Article 3 of the Corruption Law and legal remedies can be taken because they have not exceeded the expiration date of the criminal prosecution.

Keywords: Criminal Liability, Corruption, Loss of State Finances.